

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan memberikan gambaran tentang keadaan saat tidak adanya kepemilikan atau rendahnya pendapatan sehingga membuat kebutuhan dasar manusia tidak dapat terpenuhi minimal untuk hidup dengan layak, kebutuhan dasar ini seringkali kita ketahui dengan sandang, pangan, dan papan.¹ Dalam mengartikan kemiskinan seringkali dinilai pada kualitas konsumsi atau pangan, tetapi pada faktanya isu kemiskinan memiliki arti atau topik bahasan yang begitu luas. Tidak hanya terbatas pada tidak mampunya memenuhi kebutuhan, kemiskinan juga berkaitan dengan dimensi lain seperti kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan dan peranan sosial. Individu atau keluarga yang tidak mampu ini, kesulitan untuk menyediakan makanan dengan gizi seimbang, tingkat pendidikan yang tinggi, dan Hal ini menunjukkan bahwa isu ini begitu multidimensional.

Sedangkan alquran dalam menerangkan konsep kemiskinan adalah dengan menggunakan ketentuan *faqir* dan *miskin*. *Faqir* merujuk pada seseorang yang tidak mempunyai harta benda serta pekerjaan atau usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah *faqir*, *miskin* adalah kata yang sering digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang kurang secara

¹ Dadang Solihin, *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: Yayasan Empat Sembilan Indonesia, 2014), 1.

ekonomi. Secara bahasa, *miskin* berarti ‘diam’. Sedangkan secara istilah, *miskin* diartikan sebagai orang yang tidak mampu mendapatkan sesuatu demi mencukupi kebutuhan hidup dan perilaku diamnya telah menyebabkan kemiskinan.² Menurut KH. Ali Yafie, orang miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun harta dan pekerjaan tersebut belum dapat memenuhi seperdua kebutuhan hidupnya.³

Dalam Islam, kemiskinan dicap sebagai malapetaka, karena kemiskinan dianggap sebagai penyakit yang tentu akan berdampak negatif pada kehidupan, akidah, pemikiran, keharmonisan rumah tangga dan lingkungan sosial. Sehingga Islam sendiri telah mengusung ide-ide dalam upaya memberantas kemiskinan. Beberapa ide yang dirancang Islam dalam mengentaskan kemiskinan tercantum dalam Alquran, yaitu: bekerja, zakat, sedekah, dan infak. Apabila rancangan pengentasan kemiskinan ini sungguh-sungguh diterapkan maka cepat atau lambat masalah kemiskinan dapat ditangani.⁴

Isu kemiskinan dimiliki hampir di tiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Masa penjajahan Belanda selama hampir 350 tahun, pajak dan perdagangan menguntungkan penjajah dan berdampak buruk bagi penduduk Indonesia. Perekonomian Indonesia terpuruk dengan anjloknya harga ekspor ditambah lagi pengelolaan ekonomi yang buruk. Era kemerdekaan, Indonesia berada pada proses pembentukan, namun

² Syaiful Ilmi, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, (Al-Maslahah, vol. 13, no. 1, 2017), 74.

³ Asep Usman Ismail, *Kesejahteraan Sosial Perspektif Alquran*, (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, vol. 4, no. 1, 2015), 50.

⁴ Nur Yusron Karim, *Publikasi Ilmiah*, Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Alquran Menurut Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 3.

kebijakan yang lemah membuat angka kemiskinan meningkat setelah tahun 1960. Mulai pada Orde baru, pertumbuhan dan ekonomi mengarah lebih baik. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan pendapatan per kapita bertumbuh, diiringi dengan angka pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin.⁵

Di Indonesia sendiri, upaya pengentasan kemiskinan menjadi prioritas nasional pada rencana kerja pemerintah. Isu tersebut telah menjadi perhatian utama sejak hadirnya Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja hingga kini isu kemiskinan belum usai, program-program yang diusung oleh pemerintah belum dapat menangani kemiskinan di Indonesia. Usaha-usaha penanganan kemiskinan telah dilaksanakan pemerintah, namun tetap saja jumlah penduduk miskin masih begitu tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur total jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2021 adalah sebanyak 4.572,734056,00 orang, Kabupaten Kediri menyumbang angka kemiskinan sebanyak 184.490 jiwa. Jumlah yang terlampau besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Kota Kediri yang tercatat sebanyak 22.550 jiwa pada tahun yang sama.⁶

Daerah pedesaan mengambil sebagian besar jumlah rumah tangga miskin. Kesenjangan kemiskinan antara di daerah perkotaan dengan daerah pedesaan nampaknya masih tinggi. Berdasarkan penelitian Ikawati dan Sri Wahyuni, penduduk miskin yang berlokasi pada daerah pedesaan memiliki

⁵ Ibid., 7.

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur 2011-2021*, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2021/12/13/2290/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-jawa-timur-2011---2021.html>, diakses pada 11 Januari pukul 20.20 WIB.

ciri seperti: pendidikan sebagian besar Sekolah Dasar; bekerja sebagai buruh atau pada bidang pertanian; dan kepemilikan rumah milik sendiri.⁷

Untuk menganalisis isu kemiskinan, terdapat karakteristik sosial-ekonomi yang menggambarkan masyarakat miskin, yaitu dengan memperhatikan tingkat pendidikan, usia, pendapatan dan pekerjaan. Di Indonesia, tugas perhitungan jumlah penduduk yang tergolong miskin atau mampu diemban oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menentukan nilai standar kebutuhan minimum untuk kebutuhan pangan dan non pangan. Standar minimum kebutuhan pangan ditetapkan dengan kecukupan makanan sebanyak 2100 kalori/hari, ditambah dengan kebutuhan non pangan seperti tempat tinggal, pakaian, pendidikan, sarana prasarana, dan kesehatan.⁸ Selain BPS, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) juga menentukan indikator kemiskinan tersendiri. Menurut BKKBN, indikator kemiskinan mencakup: anggota keluarga makan dua kali atau lebih per hari; mempunyai rumah yang layak huni dengan kondisi baik; dapat mengakses sarana kesehatan saat sakit; dapat mengakses fasilitas pendidikan dari usia tujuh hingga limabelas tahun; dan anggota keluarga mempunyai pakaian berbeda untuk dipakai bersekolah, bekerja, atau bepergian.⁹

Telah disebutkan di awal bahwa kemiskinan merupakan isu multidimensional. Kemiskinan memiliki empat dimensi, yaitu: kesempatan yang kurang; kemampuan yang rendah; jaminan yang kurang; dan

⁷ Ikawati dan Sri Wahyuni, *Kondisi Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan*, (Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, vol. 40, no. 2, 2016), 199.

⁸ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), 2.

⁹ Yoserizal, *Indeks Kemiskinan Manusia ed II*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2015), 27.

ketidakmampuan. Kemiskinan juga dapat dihubungkan dengan terbatasnya hak sosial, ekonomi, bahkan politik seseorang. Selain itu, kemiskinan juga memiliki tautan dengan kesejahteraan, lalu saat seseorang disangka miskin umumnya seseorang tersebut tidak sejahtera.¹⁰

Kesejahteraan atau *well being* memiliki banyak pengertian dan konsep. Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan adalah kondisi yang menggambarkan bahwa seseorang mampu memenuhi kebutuhan komoditas secara general atau kemampuan untuk mendapatkan beragam barang konsumsi tertentu. Seseorang yang sejahtera mampu untuk ikut andil berperan atau berfungsi dalam masyarakat dan tahan terhadap krisis ekonomi.

Dikutip dari *World Bank*, untuk mengukur kesejahteraan dapat melalui harta benda seseorang, kesehatan, pendidikan, gizi, rumah, bahkan hak-hak tertentu.¹¹ Begitu kontras dengan kondisi kemiskinan yang dijelaskan dengan serba kekurangan. Menjadi jelas bahwa kebijakan dan program-program intervensi multidimensi perlu dimaksimalkan untuk menghapus kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan.

Menurut pandangan Islam, berdasarkan isi dalam Alquran, setiap manusia merupakan seorang khalifah. Maka agar dapat menunaikan perannya sebagai khalifah, manusia harus sejahtera yang artinya aman (tidak mengalami gangguan, baik fisik maupun sosial) dan berhubungan harmonis dengan sesama manusia. Orang yang sejahtera selain memiliki fisik yang sehat, juga harus memiliki pikiran yang sehat serta membina

¹⁰ Ibid., 17.

¹¹ Ibid., 19.

hubungan bersama masyarakat dengan baik. Ketika seseorang telah memiliki badan dan juga pikiran yang sehat, maka akan senantiasa terdorong melakukan perbuatan-perbuatan baik, seperti suka membantu dan menyayangi sesama. Kesejahteraan sosial menjadi kebutuhan dasar bagi tiap manusia, apalagi manusia akan selalu saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pandangan tersendiri terkait kesejahteraan yang membedakannya dengan pola konsep kesejahteraan yang lain. Terdapat tiga dimensi integratif, yang ketiganya harus dipenuhi untuk mewujudkan kesejahteraan, yaitu dimensi fisik, dimensi sosial, dan dimensi spiritual.

Ayat dalam Alquran yang dapat menjadi salah satu titik acuan pendekatan pada aspek kesejahteraan terdapat pada QS. Al-Baqarah (2): 177.¹²

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ الْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.¹³

¹² Waryono Abdul Ghafur, dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), 15-16.

¹³ Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 177.

Di dalam ayat ini, terkandung tumpuan dasar tentang peran penting perlindungan sosial. Selain ayat tersebut, masih terdapat beberapa ayat Alquran yang juga turut memberikan ketegasan terkait integrasi antara nilai kesejahteraan sosial, nilai pengabdian dan menyembah Allah. Alquran dengan penegasan pada aspek kesejahteraan sosial begitu revolusioner karena memberikan jawaban atas isu-isu manusia.

Islam turut memberikan beberapa strategi dalam menanggulangi isu-isu sosial. Salah satunya adalah bahwa setiap manusia harus bekerja keras dan merencanakan kehidupan dengan baik karena berdasarkan QS. Hud (11): 6, Allah SWT telah mempersiapkan segala kebutuhan manusia demi berlangsungnya kehidupan. Namun, apa yang telah dipersiapkan ini tidak dapat diperoleh begitu saja tanpa adanya usaha.¹⁴

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
*Artinya : Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).*¹⁵

Kedua, apabila terdapat masalah terkait kesejahteraan sosial, terdapat solusi yakni pemberian zakat, sedekah, infak, dan kurban. Ketiga, penegakan hukum dengan berlaku adil. Keempat, menjalin tali silaturahmi yang dapat difungsikan sebagai forum saling menasihati kepada kebaikan dan saling membantu.¹⁶

Langkah penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Usaha

¹⁴ Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam," *EQUILIBRIUM* 3, no. 2 (2015): 2.

¹⁵ Q.S. Al-Hud (11) ayat 6.

¹⁶ Waryono Abdul Ghafur, *Ibid.*, 28.

peningkatan kesejahteraan memerlukan peran aktif dari masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat ikut mendorong kesuksesan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Adanya kebijakan penanggulangan atau pengentasan kemiskinan nampaknya belum memperlihatkan capaian target dikarenakan belum menyeluruhnya atau bahkan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin dan angka kemiskinan yang belum berkurang secara signifikan.

Untuk dapat meninjau keberhasilan suatu program pengentasan kemiskinan, dapat digunakan beberapa faktor, diantaranya: perluasan akses pangan; perluasan akses layanan pendidikan; perluasan akses layanan kesehatan; tingkat kesempatan kerja dan berusaha; perluasan akses perumahan; ketersediaan air bersih; perluasan akses tanah; kemampuan berpartisipasi.

Perluasan akses pangan turut menjadi indikator keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan karena begitu erat kaitannya dengan kesejahteraan kemiskinan itu sendiri. Bantuan pangan diberikan dengan tujuan membantu masyarakat miskin dalam hal konsumsi (pangan) sehingga dapat terbebas dari ancaman kelaparan sekaligus memperhatikan kualitas gizi atau nutrisi penerima bantuan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, dengan tiga program utama yakni Program Bantuan Sosial, Program Pemberdayaan Masyarakat, dan Program Usaha Ekonomi Kecil

dan Mikro, diharapkan bantuan dapat meluas kepada rumah tangga rawan sosial-ekonomi.

Program Bantuan Sosial yang telah digagas turut menyoar pada aspek pangan sebagai wujud dari jaminan sosial terhadap masyarakat miskin. Program bantuan pangan yang dikembangkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo disebut dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai (selanjutnya disebut BPNT). Pada program BPNT, pemerintah menghendaki pemberian manfaat setiap bulannya berupa komoditas pangan kepada daftar penerima manfaat (bantuan) melalui akun elektronik yang digunakan sebagai alat transaksi untuk membeli komoditas pangan pada e-warung yang tersedia. BPNT merupakan bentuk kerja sama sinergis antara pemerintah melalui Kementerian Sosial, Himpunan Bank Negara (Himbara), pemerintah desa, dan usaha mikro (toko kelontong, pasar tradisional, agen layanan keuangan).

Setiap penerima manfaat BPNT merupakan keluarga dalam kondisi sosial ekonomi terendah di daerah penyaluran, penerima manfaat disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam hal ini Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab untuk merilis nama-nama pada Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT.¹⁷ Setiap bulannya, KPM mendapatkan besaran manfaat sebesar Rp. 200.000 yang ditransfer oleh Bank Himbara ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi melalui mesin EDC milik e-warung.

¹⁷ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Secara Nontunai Sosial, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019*, (Jakarta: Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019), 20.

Perlu ditekankan bahwa BPNT ini hanya dapat dicairkan dengan komoditas pangan yang telah ditetapkan, dilarang dan tidak dapat dicairkan dalam bentuk yang lain, misalnya uang tunai. Komoditas pangan yang disediakan adalah bahan-bahan pangan yang dapat dengan mudah didapatkan pada masing-masing daerah. Contoh komoditas pangan ini adalah: beras; sayuran; buah; kacang tanah; kacang hijau; daging ayam/sapi, dan masih banyak lagi. KPM dapat bertransaksi di e-warung (yang telah disetujui) yang telah menyediakan komoditas pangan. Penentuan komoditas pangan harus sesuai dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi dan nutrisi KPM dan ketersediaan komoditas pada daerah pelaksanaan. Sehingga memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan komoditas pangan yang diterima oleh KPM.

BPNT merupakan sebuah ide revolusioner yang dalam satu program dapat mencapai beberapa tujuan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mengapa dikatakan demikian, karena BPNT telah meninggalkan mekanisme bantuan langsung seperti yang dilaksanakan sebelumnya, sebaliknya mendukung perkembangan teknologi finansial melalui akun elektronik KKS. Melalui BPNT, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan penyediaan pangan berkualitas kepada masyarakat miskin, tetapi juga turut membantu pertumbuhan perekonomian usaha kecil (sebagai e-warung) di daerah. BPNT juga menunjukkan kemajuan penerapan sistem elektronik khususnya pada bidang perbankan dan meningkatkan transparansi serta keuangan inklusif.

Kabupaten Kediri mulai melaksanakan penyaluran BPNT lebih kurang pada bulan Oktober 2018, lebih lambat dari wilayah Kota Kediri yang lebih dulu melaksanakan penyaluran. Program BPNT di Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Bank BNI dalam proses distribusi kartu KKS sampai dengan *inject* dana bantuan sosial. Tercatat pada Kabupaten Kediri terdapat 26 kecamatan, 343 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Semen termasuk dalam ke-26 kecamatan yang telah melaksanakan alur pendistribusian BPNT dengan jumlah KPM sebanyak 4653 terhitung pada penambahan KPM bulan Juli 2021.

Pada bulan Mei ke Juli tahun 2021, rekap data bayar BPNT di Kecamatan Semen mengalami perubahan pada total jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Desa Bobang termasuk pada tiga desa dengan jumlah KPM terendah, tetapi memiliki angka penambahan tertinggi yaitu sebesar 12 KPM bila dibandingkan dengan dua desa lainnya yaitu Desa Semen dan Desa Titik yang masing-masing mengalami penambahan KPM sebanyak 11 dan 3. Sedangkan Desa Bobang memiliki 2 e-warung.

Penulis menemukan beberapa permasalahan di lapangan, yaitu masih terdapatnya beberapa komplain dari masyarakat yang mengaku dirinya tidak mampu yang namanya tidak termasuk pada daftar KPM dan pengurangan KPM tanpa adanya informasi sebelumnya yang ditandai dengan gangguan (paling banyak *error 06*) pada kartu elektronik BPNT yang menyebabkan KPM tidak dapat mencairkan bantuan.

Berdasarkan data dan temuan di lapangan terkait dengan penyaluran BPNT di Desa Bobang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, disertai studi

literasi di atas, penulis ingin menganalisis implementasi BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memperoleh pembahasan yang lebih spesifik, penulis menggunakan teori *kulliyat al-khamsah* dari Asy-Syathibi dan tahapan keluarga sejahtera dari BKKBN untuk keperluan pengkajian. Penggunaan teori *kulliyat al-khamsah* disamping teori keluarga sejahtera BKKBN disebabkan terdapat kesamaan kandungan-kandungan pada indikator kesejahteraan pada kedua teori. Muatan kebutuhan dasar manusia pada teori *kulliyat al-khamsah* Asy-Syathibi dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan. Sama halnya dengan teori keluarga sejahtera oleh BKKBN, terdapat indikator-indikator yang harus terpenuhi untuk dapat dikategorikan ke dalam lima tahapan keluarga sejahtera. Agar terdapat perbandingan indikator antar disiplin ilmu untuk kepentingan perluasan wawasan. Atas dasar tersebut, penulis bermaksud meneliti persoalan tersebut dengan judul **“Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bobang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bobang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima BPNT di Desa Bobang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dalam perspektif ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bobang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan di Desa Bobang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dalam perspektif ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan sekaligus informasi terkait implementasi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang digagas oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan menjadi masukan dan referensi untuk para akademisi dan praktisi dalam pengembangan ilmu dan penelitian dengan tema yang sama di masa mendatang.
- b. Sebagai masukan bagi pihak yang terkait pada pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) khususnya Pemerintah Desa Bobang, Agen 46 E-Waroeng, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam rangka evaluasi dan pengembangan.

E. Telaah Pustaka

1. **“Peranan Dana Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)”**, ditulis oleh Rizcha Rif’atu Ni’mah mahasiswi IAIN Kediri tahun 2017.¹⁸ Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terkait objek penelitian berupa program bantuan sosial di mana penelitian menyoroti bagaimana program bantuan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah dapat memberikan dampak bagi masyarakat salah satunya

¹⁸ Rizcha Rif’atu Ni’mah, *Skripsi*; Peranan Dana Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Kediri, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2017).

yaitu pengaruhnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam hal perbedaan terletak pada jenis bantuan yang akan diteliti di mana penelitian ini membahas program PKH, berbeda halnya dengan penulis yang membahas program BPNT.

2. **“Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi Kasus di Desa Sambiresik, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri)”**, ditulis oleh Siti Yuraida Zumaroh mahasiswa IAIN Kediri tahun 2020.¹⁹ Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus sebagai jenis penelitian. Pada penelitian ini telah digunakan metode pengumpulan data yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Agar data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan di lapangan, peneliti menggunakan cara teknik triangulasi dan ketekunan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menyoroti program BPNT melalui tinjauan maqashid Islam. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada proses distribusi beserta kesesuaiannya dengan prinsip distribusi Islam, sedangkan peneliti akan berfokus pada peran BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menerima.
3. **“Analisis Dampak Kompleksitas Masalah Penyaluran BPNT Pada Keluarga Penerima Manfaat (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)”**, yang ditulis oleh Nur Indah

¹⁹ Siti Yuraida Zumaroh, *Skripsi*; Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi Kasus di Desa Sambiresik, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri), (Kediri, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020).

Kumala Sari mahasiswa IAIN Kediri tahun 2020.²⁰ Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan untuk teknik analisis data digunakanlah model analisis Miles dan Huberman. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menyoroti implementasi program sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini berfokus pada hadirnya problematika pada distribusi BPNT, sedangkan peneliti berfokus pada implementasi program BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan sosial.

4. **“Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”**, yang ditulis oleh Ahda Sulukin Nisa mahasiswa UIN Raden Intan Lampung tahun 2019.²¹ Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif yang menunjukkan bahwa penelitian bermaksud untuk menggambarkan secara lengkap terkait keadaan objek penelitian. Terdapat empat teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu: wawancara; kuesioner;

²⁰ Nur Indah Kumala Sari, *Skripsi; Analisis Dampak Kompleksitas Masalah Penyaluran BPNT Pada Keluarga Penerima Manfaat (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)*, (Kediri, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020).

²¹ Ahda Sulukin Nisa, *Skripsi; Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, (Lampung Selatan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

observasi; dan dokumen. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 864 Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar sebagai penerima BPNT di Desa Merak Batin dan diambil sebanyak 90 sampel KK dengan perhitungan Slovin. Peneliti menggunakan cara deskriptif analisis kualitatif untuk menganalisa data dengan mengklarifikasi data-data berdasarkan persamaan jenis, dilanjutkan dengan penguraian yang akan diperoleh gambaran permasalahan secara utuh. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan fokus pada peranan program BPNT pada kesejahteraan masyarakat penerima. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dalam menentukan sampel.

5. **“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Dusun Dondong, Jetis, Saptosari, Gunungkidul”**, yang ditulis oleh Retno Wintari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020.²² Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik penarikan informan menggunakan *purposive sampling* dengan adanya kriteria. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam teknik pengumpulan datanya. Sedangkan untuk pengujian data, penelitian ini telah menggunakan teknik triangulasi sumber. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah selain kesamaan tema atau topik yang diusung juga terdapat kesamaan pada metode penentuan informan yang

²² Retno Wintari, *Skripsi; Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Dusun Dondong, Jetis, Saptosari, Gunungkidul*, (Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020).

digunakan. Perbedaannya terletak pada tinjauan ilmu yang diterapkan pada penelitian.